

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem meritokrasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sistem meritokrasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adil, dan berorientasi pada kinerja, sebagaimana yang diharapkan dalam reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem merit pada Biro Kesejahteraan Rakyat telah berjalan cukup baik, sebagian besar telah mengacu pada prinsip kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memenuhi standar merit, serta tantangan dalam penerapan secara konsisten di seluruh jenjang birokrasi dan masih terpaku pada budaya lama. Temuan ini sejalan dengan teori birokrasi Max Weber yang menekankan pentingnya sistem yang rasional, terstruktur, dan berbasis pada aturan yang jelas untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dan pengawasan yang berkelanjutan agar sistem merit dapat diimplementasikan secara optimal dan merata di seluruh unit kerja pemerintahan.

Kata Kunci: Sistem Meritokrasi, Aparatur Sipil Negara, Implementasi, Birokrasi, Max Weber, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the meritocracy system in the State Civil Apparatus (ASN) within the West Sumatra Provincial Government, especially in the Bureau of People's Welfare of the Regional Secretariat of West Sumatra Province. The meritocracy system is one of the important approaches in realizing a professional, fair, and performance-oriented bureaucracy, as expected in bureaucratic reform. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the merit system in the Bureau of People's Welfare has been running quite well, most of them have referred to the principles of qualification, competence, and performance. However, there are several obstacles such as limited human resources that truly meet the eligibility standards, as well as challenges in implementing it consistently across competencies and still underlying the old culture. This finding is in line with Max Weber's bureaucratic theory which emphasizes the importance of a rational, structured system based on clear rules to realize an efficient and effective bureaucracy. Therefore, it is necessary to strengthen commitment and ongoing supervision so that the merit system can be implemented optimally and evenly across all government work units.

Keywords: Meritocracy System, State Civil Apparatus, Implementation, Bureaucracy, Max Weber, West Sumatra Provincial Government.